

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 149/PUU-VII/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMISAHAN (*UNBUNDLING*) PERUSAHAAN GAS NEGARA GUNA MENCAPAI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
149/PUU-VII/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP
KEBIJAKAN PEMISAHAN (*UNBUNDLING*) PERUSAHAAN GAS
NEGARA GUNA MENCAPAI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

Oleh :

SONIA NOERAVITA

E0012370

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Surakarta, Senin 13 Juni 2016

Dosen Pembimbing I



Dr. Isharyanto.S.H.,M.Hum
197805012003121002

Dosen Pembimbing II



Maria Madalina S.H.,M.Hum
196010241986022001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 149/PUU-VII/2009
TENTANG KETENA GALISTRIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMISAHAN
(UNBUNDLING) PERUSAHAAN GAS NEGARA GUNA MENCAPAI PEMENUHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Oleh :

SONIA NOERAVITA

E0012370

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

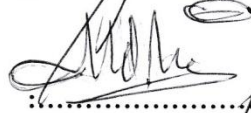
Hari /Tanggal : Senin / 20 Juni 2016

DEWAN PENGUJI

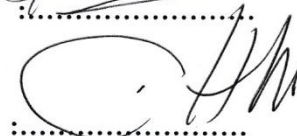
1) **Suranto S.H.,M.H**
NIP 195608121986011001
Ketua

.....


2) **Maria Madalina S.H.,M.Hum**
NIP 196010241986022001
Sekertaris

.....


3) **Dr. Isharyanto.S.H.,M.Hum**
NIP 197805012003121002
Anggota

.....


Mengetahui,



Dean Fakultas Hukum UNS


(Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum)
NIP.19601107 198601 1001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sonia Noeravita

NIM : E0012370

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 149/PUU-VII/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMISAHAN (*UNBUNDLING*) PERUSAHAAN GAS NEGARA GUNA MENCAPAI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukand alam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Juni 2016

Yang membuat
pernyataan



Sonia Noeravita
NIM E0012370

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisaa':58).

Hasil pekerjaan yang kita kerjakan mencerminkan diri kita, sesungguhnya kerja keras dan tanggungjawab merupakan kunci keberhasilan atas apa yang sedang dikerjakan.

(Ayahanda Ir.Nyoto Noer Cahyo S.Kom)

If you study well, you will be able to make a better world for others

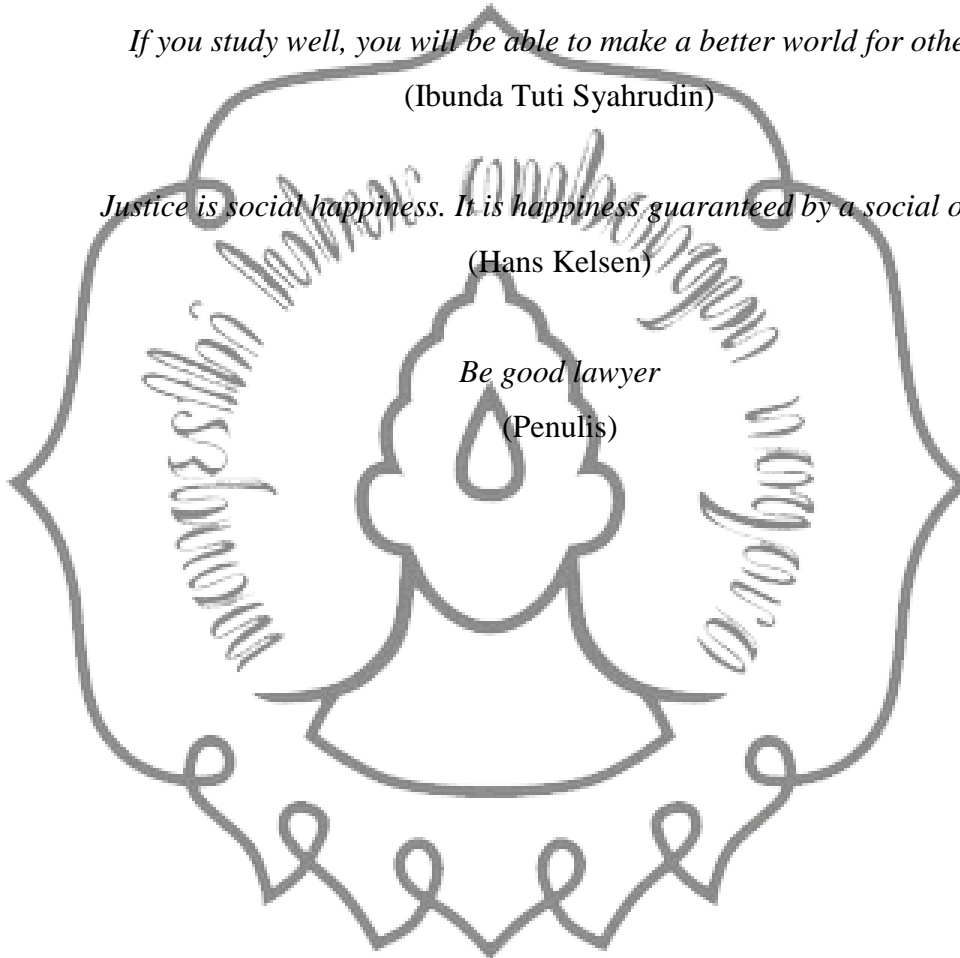
(Ibunda Tuti Syahrudin)

Justice is social happiness. It is happiness guaranteed by a social order

(Hans Kelsen)

Be good lawyer

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT yang memberikan kehidupan yang penuh rahmat

Kepada kedua orangtua saya Ir.Nyoto Noer Cahyo S.Kom dan Tuti Syahrudin yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa untuk saya

Kepada adik Gery Rahardian Sony Ricardo yang terus memberikan motivasi kepada saya untuk selalu bekerja keras

Kepada keluarga besar Nganjuk-Soeroso maupun Padang-Mia yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan kepenulisan ini

Kepada sahabat yang selalu mengingatkan, mendukung, dan menyayangi saya selalu Vivi Mauliana, Yulia Putri, Melisa Zurkanain, Anda Putra, Ghesa Agnanto

Hutomo & Sherly Nelsa Fitri

Kepada keluarga besar KSP “Principium” yang telah memberikan berbagai pengalaman terutama dalam hal kepenulisan

Kepada Dosen Pembimbing Bapak Ishryanto dan ibu Maria Madalina yang dengan sabar memberikan bimbingan dalam kepenulisan kali ini

Kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat

ABSTRAK

Sonia Noeravita. 2016. E0012370. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 149/PUU-VII/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMISAHAN (UNBUNDLING) PERUSAHAAN GAS NEGARA GUNA MENCAPAI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Penulisan Hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan Pemisahaan (*Unbundling*) kegiatan usaha niaga dan pengangkutan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mampu memenuhi hak konstitusional warga negara dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial serta kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap kebijakan tersebut.

Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

Kebijakan *unbundling* melalui Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2009 tidak mampu memenuhi kesejahteraan sosial, pasalnya prinsip dan dampak yang timbul tidak sejalan dengan penguasaan negara atas sumber daya energi yang terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menegaskan bahwa *unbundling* akan menghilangkan penguasaan negara, penguasaan negara akan selalu terikat dengan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Unbundling*, Penguasaan Negara, Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

Sonia Noeravita.2016.E0012370. THE IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.149/PUU-VII/2009 CONCERNING ELECTRICITY POLICY ON SEPARATION (UNBUNDLING) PERUSAHAAN GAS NEGARA TO ACHIEVE SOCIAL WELFARE. Legal Writing. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.

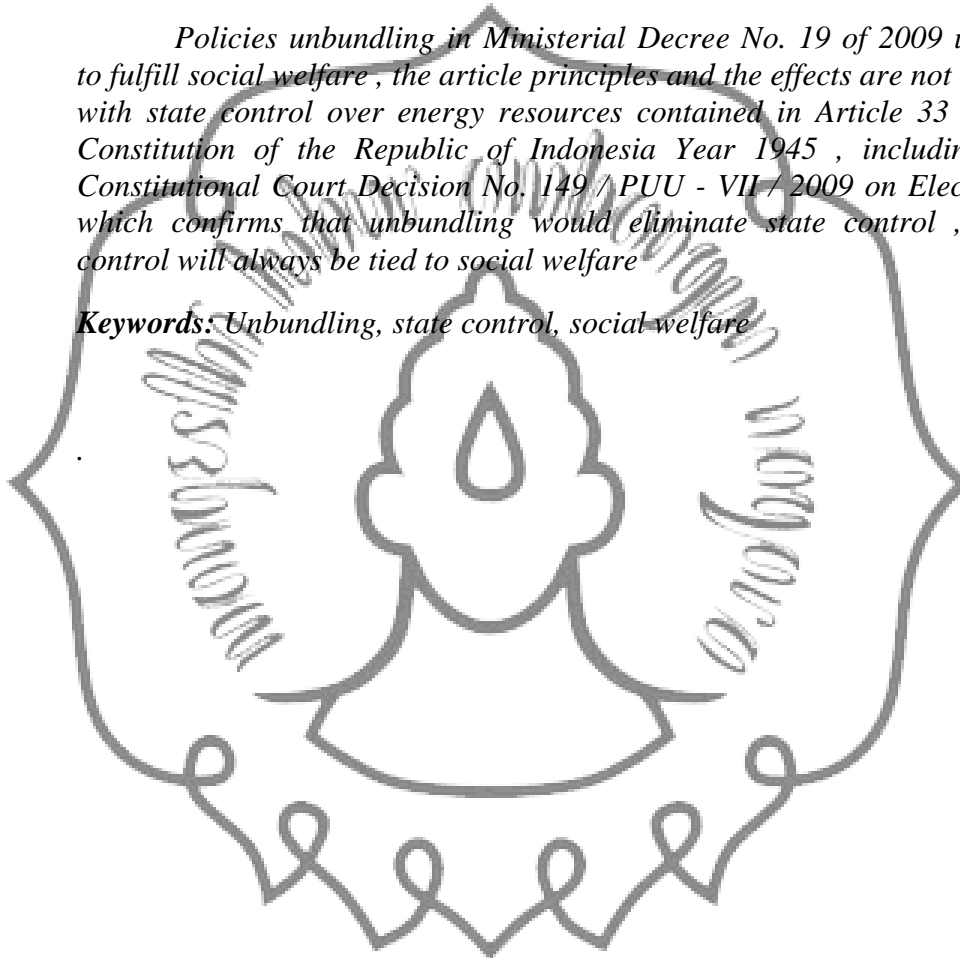
This reasearch aimed to find out This study aims to determine whether the policy of separation (unbundling) business activities in trade

and transport, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk is able to fulfill the constitutional rights of citizens in the enjoyment of social welfare and the relation with the decision of the Constitutional Court Number 149 / PUU - VII / 2009 on Electricity policy.

Type of this research is normative legal research. The approach used was statute and concept approaches. The law material used consisted of primary and secondary law source. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern

Policies unbundling in Ministerial Decree No. 19 of 2009 unable to fulfill social welfare , the article principles and the effects are not in line with state control over energy resources contained in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 , including the Constitutional Court Decision No. 149 / PUU - VII / 2009 on Electricity which confirms that unbundling would eliminate state control , state control will always be tied to social welfare

Keywords: *Unbundling, state control, social welfare*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan KaruniaNya, serta sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah menghantarkan

kita kepada masa yang cerah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 149/PUU-VII/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMISAHAN (*UNBUNDLING*) PERUSAHAAN GAS NEGARA GUNA MENCAPAI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Suarakarta.

Penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Maret Surakarta
2. Bapak Dr. Isharyanto S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu Penulis dimulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Maria Madalina S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembim,bing I yang telah membantu Penulis dimulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini
4. Ibu Zakki Adhityati S.H.,M.H.,LL.M selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mendampingi Penulis dari proses awal hingga akhir masa studi di FH UNS
5. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang telah memberikan pengalaman kerja dan membantu dalam menyelesaikan kepenulisan ini, kepada Bapak Temmy, Bapak Faturahman, Bapak Suryadi, Mas Ansori, Abirul, Billy, Sabi, Tommy, Ibu Lita Wulandari, Marie Massie, Mbak Atika dan Navis
6. Bapak Nyoto Noer Cahyo dan Ibu Tuti Syahrudin yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa untuk saya
7. Adik Gery Rahardian Sony Ricardo yang terus memberikan motivasi kepada saya untuk selalu bekerja keras
8. Keluarga besar Nganjuk-Soeroso maupun Padang-Mia yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan kepenulisan ini

9. Sepupu-sepupu saya yang telah memberikan cinta dan semangat dalam keadaan apapun Kezia Salasa Bella, Hannura Ayu Surya Ningrum, Nancy Karina, Nandya Karina, Kevin Bramantiko, Mas Prasetyo, Mas Bagus Baskoro, Mas Anggi & Angga.
 10. Sahabat yang selalu mengingatkan, mendukung, dan menyayangi saya selalu Vivi Mauliana, Yulia Putri, Melisa Zurkanain, Anda Putra, Ghesa Agnanto Hutomo & Sherly Nelsa Fitri
 11. Keluarga KKN Tapak yang telah memotivasi untuk menyelesaikan kepenulisan ini, Alexander Adi Andra Utama, Eko Susanto, M. Faris Tito Perdana, Wisnu Wiyangga Putra, Adelia Suryaningrum, Amalia Permahani, Lely Anna Puspa Sari, Nurhidayah & Rina.
 12. Keluarga besar KSP “Principium” yang telah memberikan berbagai pengalaman terutama dalam hal kepenulisan
 13. Teman Magang saya dalam mencari pengalaman dan ilmu di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Apectriaszihaningrum & Ignas Ridlo Anarki
- Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kepenulisan ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua. Amin.

Surakarta, 13 Juni 2016

Penulis

Sonia Noeravita

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Hukum	15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Mengenai Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Energi	17
a. Teori Hukum Kedaulatan.....	17
b. Teori Hukum Kedaulatan Negara	18
c. Sumber Daya Energi	20
d. Teori Penguasaan Negara atas Sumber Daya Energi.....	23
e. Konsep Hak Menguasai Negara di Indonesia	25
2. Tinjauan Mengenai Gas Bumi	29
a. Gas Bumi	29
b. Prinsip Pengelolaan Gas Bumi.....	30
c. Tata Kelola Gas Bumi.....	30

3. Tinjauan Mengenai <i>Unbundling</i>	36
4. Tinjauan Mengenai Kesejahteraan Sosial	47
a. Defenisi Kesejahteraan Sosial.....	47
b. Tujuan Kesejahteraan Sosial.....	49
c. Fungsi Kesejahteraan Sosial	49
d. Konsep Kesejahteraan Sosial di Indonesia	49
B. Kerangka Pemikiran`	51

BAB III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemisahaan (<i>Unbundling</i>) Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	54
1. Keselarasan Penerapan Kebijakan <i>Unbundling</i> Secara Yuridis di Indonesia.....	54
2. Dampak Kebijakan <i>Unbundling</i> bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Terhadap Kesejahteraan Sosial.....	65
B. Kaitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap kebijakan pemisahaan (<i>Unbundling</i>) Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.....	80

BAB IV PENUTUP

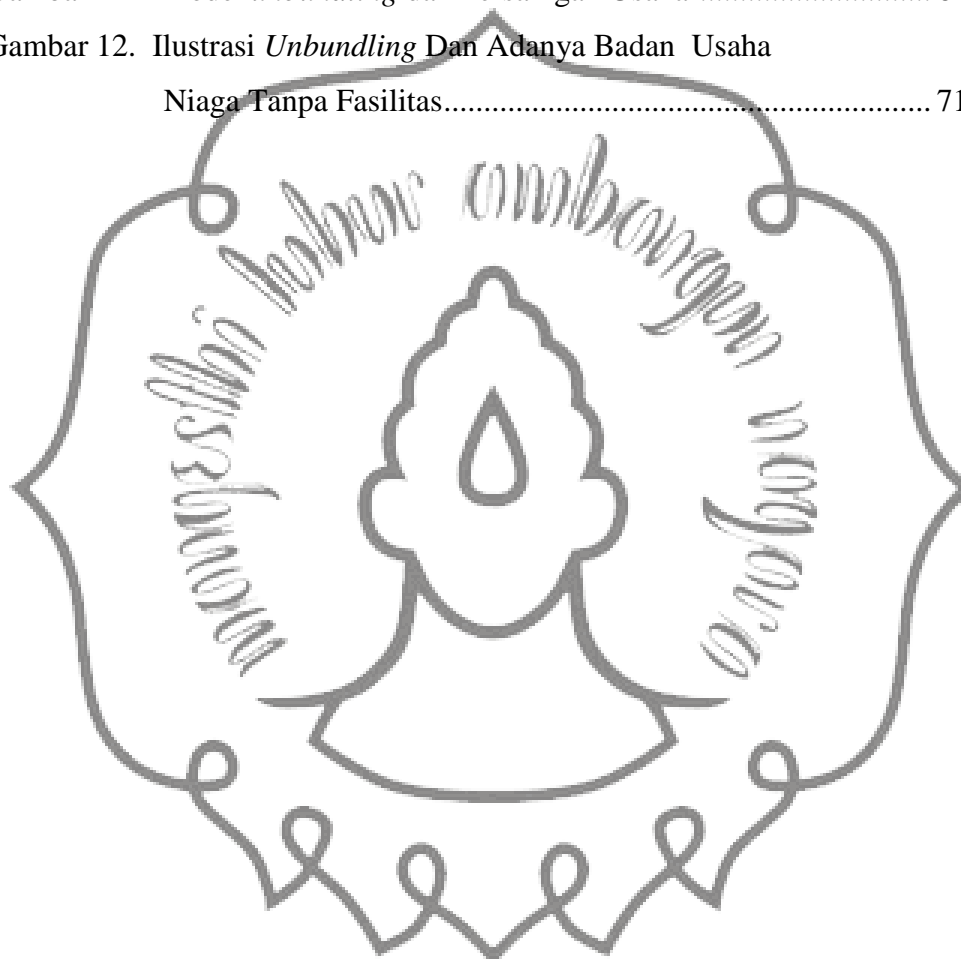
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Geografis Cadangan Gas Indonesia.....	3
Gambar 2. Sumber Energi.....	22
Gambar 3. Peraturan Tata Kelola Gas Bumi	36
Gambar 4. Kegiatan Usaha Perusahaan Gas Negara	40

Gambar 5.	Industri Bumi Intergrasi Vertikal	43
Gambar 6.	Model Persaingan Dalam Produksi Gas Bumi	43
Gambar 7.	<i>Open Access</i> Dan Kompetisi <i>Wholesale</i>	44
Gambar 8.	Model <i>Unbundling</i> Dan Persaingan Retail	44
Gambar 9.	Empat Model Tahapan Pengelolaan Gas Bumi	51
Gambar 10.	Model Persaingan Dalam Produksi Gas Bumi.....	61
Gambar 11	Model <i>unbundling</i> dan Persaingan Usaha	61
Gambar 12.	Ilustrasi <i>Unbundling</i> Dan Adanya Badan Usaha Niaga Tanpa Fasilitas.....	71



DAFTAR TABEL

Table 1	Perbedaan Peraturan Gas Bumi.....	45
Table 2	Perbedaan Peraturan Gas Bumi.....	61
Tabel 3	Kegiatan Usaha Pt Pgn	66
Table 4	Rantai Bisnis Dan Perbandingan Cost Skema <i>Bundled</i>	

Service Dan Unbundling 68
Tabel 5 *Number Of Customers PT PGN As December 2015* 72

